



Transformasi Politik Islam dalam Merespons Konflik Pakistan–India di Era Digital

Aris Munandar^{1*}, Amany Lubis², Maulida Fitria³

^{1,2}. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

³ Universitas Gadjah Mada, Indonesia

* Penulis Korespondensi: arism2365@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the transformation of Islamic politics in responding to the Pakistan-India conflict in the digital era by examining changes in response patterns, political strategies, and reconstruction of Islamic political narratives in the Kashmir issue. The Pakistan-India conflict is not only influenced by geopolitical and territorial disputes, but is also closely related to religious identity, nationalism, and Islamic political dynamics in both countries. The development of digital technology has changed the way Islamic political actors build legitimacy, solidarity, and political mobilization through social media and digital space. This research uses a qualitative approach with the type of library research that utilizes various academic sources in the form of books, journal articles, research reports, and relevant documents related to Islamic politics, the Pakistan-India conflict, and political digitalization. Data was analyzed using content analysis techniques through the process of reduction, categorization, interpretation, and data synthesis in a descriptive-analytical manner. The results of the study show that Islamic politics in Pakistan and India has undergone a transformation from a traditional mobilization pattern based on political parties, clerics, and religious organizations to a more flexible, pragmatic, and transnational form. The digital era is accelerating this change through the use of social media as a new arena for the formation of public opinion, global Muslim solidarity, and political mobilization related to the Kashmir issue. In addition, the reconstruction of Islamic political narratives shows a shift from an exclusive ideological narrative towards the use of more universal political language such as human rights, social justice, and peace. This study concludes that Islamic politics in the digital era has an ambivalent position, which can be a factor in the escalation of conflicts through digital polarization, but also opens up opportunities for dialogue, digital diplomacy, and peacebuilding in the South Asian region.*

Keywords: *Digital Age, Islamic Political Transformation, Islamic Politics, Kashmir, Pakistan–India Conflict..*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi politik Islam dalam merespons konflik Pakistan–India di era digital dengan menelaah perubahan pola respons, strategi politik, serta rekonstruksi narasi politik Islam dalam isu Kashmir. Konflik Pakistan–India tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa geopolitik dan wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas keagamaan, nasionalisme, serta dinamika politik Islam di kedua negara. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara aktor politik Islam membangun legitimasi, solidaritas, dan mobilisasi politik melalui media sosial dan ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan berbagai sumber akademik berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen relevan terkait politik Islam, konflik Pakistan–India, dan digitalisasi politik. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis data secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam di Pakistan dan India mengalami transformasi dari pola mobilisasi tradisional berbasis partai politik, ulama, dan organisasi keagamaan menuju bentuk yang lebih fleksibel, pragmatis, dan transnasional. Era digital mempercepat perubahan tersebut melalui pemanfaatan media sosial sebagai arena baru pembentukan opini publik, solidaritas Muslim global, serta mobilisasi politik terkait isu Kashmir. Selain itu, rekonstruksi narasi politik Islam menunjukkan adanya pergeseran dari narasi ideologis yang eksklusif menuju penggunaan bahasa politik yang lebih universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik Islam di era digital memiliki posisi ambivalen, yakni dapat menjadi faktor eskalasi konflik melalui polarisasi digital, tetapi juga membuka peluang bagi dialog, diplomasi digital, dan pembangunan perdamaian di kawasan Asia Selatan.

Kata kunci: *Era Digital, Kashmir, Konflik Pakistan–India, Politik Islam, Transformasi Politik Islam.*

1. LATAR BELAKANG

Konflik Pakistan–India merupakan salah satu konflik geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan di kawasan Asia Selatan. Konflik ini tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa

wilayah, tetapi juga dipicu oleh faktor identitas nasional dan agama yang melekat kuat pada kedua negara. Sejak pemisahan wilayah kolonial Inggris pada tahun 1947, Pakistan dibentuk sebagai negara dengan identitas Muslim, sedangkan India memilih sistem negara sekuler dengan mayoritas Hindu. Persoalan Kashmir menjadi titik utama konflik karena wilayah tersebut mayoritas dihuni Muslim, tetapi berada dalam administrasi India sehingga memunculkan klaim politik dan historis dari kedua negara (Ganguly, 2002). Dengan demikian, konflik Pakistan–India tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa teritorial, melainkan juga sebagai pertarungan identitas politik dan keagamaan yang terus berkembang hingga era kontemporer.

Politik Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk respons terhadap konflik Pakistan–India, terutama di Pakistan sebagai negara yang mendasarkan identitas nasionalnya pada Islam. Politik Islam di Pakistan tidak sekadar berfungsi sebagai ekspresi keagamaan, melainkan menjadi instrumen legitimasi negara dan mobilisasi politik masyarakat Muslim. Partai-partai Islam seperti *Jamaat-e-Islami* memanfaatkan narasi solidaritas umat (*ummah*), keadilan bagi Muslim Kashmir, serta simbolisme jihad dalam memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan negara terkait Kashmir (Nasr, 2001). Oleh sebab itu, politik Islam di Pakistan menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana negara dan masyarakat merespons konflik dengan India.

Di sisi lain, politik Islam di India berkembang dalam konteks yang berbeda karena Muslim berada pada posisi minoritas dalam negara demokrasi sekuler. Kondisi ini menyebabkan politik Islam di India lebih diarahkan pada perjuangan perlindungan hak-hak minoritas Muslim dibandingkan sebagai instrumen legitimasi negara (Munhanif & Yasin, 2023). Penguatan nasionalisme Hindu, terutama sejak pemerintahan Bharatiya Janata Party (BJP), memperbesar ketegangan identitas politik umat Islam, khususnya setelah pencabutan status otonomi Jammu dan Kashmir melalui Pasal 370 pada tahun 2019 yang memicu kritik luas dari komunitas Muslim (Schofield, 2021). Dengan demikian, politik Islam di India lebih berorientasi pada upaya mempertahankan eksistensi sosial-politik Muslim di tengah meningkatnya polarisasi identitas nasional.

Transformasi teknologi digital telah mengubah pola respons politik Islam terhadap konflik Pakistan–India secara signifikan. Perubahan tersebut terjadi karena media digital memungkinkan aktor politik, organisasi Islam, maupun masyarakat sipil untuk membangun opini publik secara cepat dan masif. Platform seperti X (Twitter), Facebook, Telegram, dan YouTube kini digunakan sebagai arena pertarungan narasi mengenai Kashmir, identitas Muslim, dan nasionalisme negara. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial di Pakistan

dan India memperkuat polarisasi politik melalui penyebaran informasi yang bersifat emosional, nasionalistik, bahkan provokatif terhadap kelompok lawan (Tyagi dkk., 2020). Oleh karena itu, era digital menjadikan konflik Pakistan–India tidak lagi berlangsung semata pada arena fisik, tetapi juga berkembang menjadi konflik narasi di ruang siber.

Digitalisasi pada satu sisi membuka ruang solidaritas transnasional umat Islam, tetapi di sisi lain juga memperbesar risiko disinformasi dan radikalisasi politik. Kemudahan akses informasi memungkinkan masyarakat Muslim global memberikan dukungan terhadap isu Kashmir melalui kampanye digital, petisi internasional, maupun mobilisasi opini publik lintas negara. Namun demikian, teknologi digital juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, ujaran kebencian, dan berita palsu yang memperburuk ketegangan sosial-politik antara India dan Pakistan. Studi mengenai penyebaran informasi digital di Pakistan menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat sirkulasi *misinformation* yang berdampak pada meningkatnya polarisasi publik (Haroon dkk., 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan baru bagi politik Islam dalam mengelola konflik secara lebih konstruktif.

Meskipun kajian mengenai konflik Pakistan–India telah banyak dilakukan, penelitian tentang transformasi politik Islam dalam merespons konflik tersebut di era digital masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada isu keamanan regional, militerisasi Kashmir, atau rivalitas geopolitik kedua negara, sedangkan dimensi transformasi politik Islam berbasis digital belum banyak dianalisis secara mendalam (Bose, 2021). Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu diisi untuk memahami bagaimana politik Islam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dalam konteks konflik modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis transformasi politik Islam dalam merespons konflik Pakistan–India di era digital, khususnya terkait perubahan pola mobilisasi politik, pembentukan solidaritas Muslim transnasional, dan dinamika kontestasi identitas keagamaan di ruang digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis transformasi politik Islam dalam merespons konflik Pakistan–India di era digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi gagasan, dinamika politik Islam, serta perubahan pola respons aktor politik Muslim terhadap konflik geopolitik melalui berbagai sumber literatur akademik yang relevan. Metode

kepastakaan memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data konseptual dan empiris yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber ilmiah (Creswell, 2018). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk mengkaji hubungan antara politik Islam, konflik geopolitik, dan perkembangan teknologi digital secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku akademik, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi yang membahas politik Islam, konflik Pakistan–India, isu Kashmir, globalisasi, dan transformasi digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berita internasional kredibel, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah pendukung yang relevan dengan konteks geopolitik Asia Selatan. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi tema, keterbaruan publikasi, serta keterkaitan langsung dengan fokus penelitian (Zed, 2014). Oleh karena itu, data yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai transformasi politik Islam dalam konteks konflik Pakistan–India di era digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur akademik dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Taylor & Francis, Springer, serta jurnal-jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Proses penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti Islamic politics, Pakistan–India conflict, Kashmir conflict, digital politics, Islam and digitalization, serta political Islam in South Asia. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian dan kontribusinya terhadap analisis yang dikembangkan. Dengan cara ini, penelitian dapat memperoleh data yang relevan dan memiliki validitas akademik yang memadai.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan mengidentifikasi literatur yang relevan; (2) kategorisasi data berdasarkan tema utama, seperti politik Islam, konflik Pakistan–India, geopolitik Kashmir, digitalisasi, dan transformasi politik; (3) interpretasi data untuk menemukan pola hubungan antarvariabel; serta (4) penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis argumentatif dari berbagai sumber yang telah dianalisis (Krippendorff, 2018). Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana politik Islam mengalami transformasi dalam merespons konflik Pakistan–India di tengah perkembangan era digital.

Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai informasi dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga

internasional, dan publikasi media kredibel guna memperoleh konsistensi data. Selain itu, penelitian juga menekankan pada penggunaan sumber-sumber ilmiah yang memiliki otoritas akademik dan relevansi tinggi terhadap fokus kajian. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat objektivitas, reliabilitas, dan validitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Islam dalam Konflik Pakistan–India: Sejarah, Identitas, dan Kontestasi Politik

Konflik Pakistan–India tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan kedua negara yang berakar pada pemisahan wilayah kolonial Inggris tahun 1947. Konflik tersebut muncul karena proses *partition* melahirkan dua negara dengan basis identitas yang berbeda, yakni Pakistan sebagai negara yang dibangun atas aspirasi politik Muslim dan India sebagai negara sekuler dengan pluralitas agama (Majid dkk., 2020). Pemisahan ini tidak hanya menghasilkan migrasi besar-besaran dan kekerasan komunal, tetapi juga menyisakan persoalan wilayah Kashmir yang hingga kini menjadi pusat sengketa geopolitik. Kashmir memiliki posisi strategis karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi secara administratif berada di bawah kontrol India, sehingga memunculkan klaim politik dan historis dari Pakistan maupun India (Ganguly, 2002). Dengan demikian, akar konflik Pakistan–India tidak hanya bersifat teritorial, melainkan juga berkaitan erat dengan konstruksi identitas agama dan nasionalisme yang berkembang sejak kemerdekaan kedua negara.

Politik Islam memiliki posisi yang sangat sentral dalam pembentukan identitas nasional Pakistan. Hal ini disebabkan Pakistan lahir melalui gagasan *Two-Nation Theory* yang menempatkan Muslim dan Hindu sebagai dua komunitas politik yang berbeda sehingga membutuhkan negara tersendiri bagi umat Islam di anak benua India (Zubair dkk., 2022). Islam kemudian berkembang tidak hanya sebagai identitas religius, tetapi juga sebagai dasar legitimasi politik negara dalam membangun kohesi nasional dan orientasi kebijakan luar negeri, termasuk terhadap isu Kashmir. Berbagai kelompok politik Islam seperti *Jamaat-e-Islami* memainkan peran penting dalam membangun narasi bahwa Kashmir merupakan bagian dari perjuangan solidaritas Muslim yang harus dipertahankan melalui dukungan politik maupun moral (Nasr, 2001). Oleh karena itu, politik Islam di Pakistan berkembang sebagai instrumen ideologis negara sekaligus alat mobilisasi politik masyarakat Muslim dalam menghadapi India.

Berbeda dengan Pakistan, politik Islam di India berkembang dalam konteks masyarakat minoritas Muslim di bawah sistem negara sekuler dan demokratis. Posisi Muslim sebagai kelompok minoritas menyebabkan orientasi politik Islam di India lebih diarahkan pada perlindungan hak-hak sipil, representasi politik, dan keberlangsungan identitas keagamaan di tengah dominasi mayoritas Hindu. Dalam perkembangannya, meningkatnya nasionalisme Hindu di bawah pemerintahan Bharatiya Janata Party (BJP) memperkuat ketegangan identitas, terutama sejak pencabutan Pasal 370 pada tahun 2019 yang menghapus status otonomi Jammu dan Kashmir. Kebijakan tersebut dipandang banyak kelompok Muslim sebagai bentuk marginalisasi politik yang mempersempit ruang partisipasi politik dan identitas Muslim di Kashmir (Schofield, 2021). Dengan demikian, politik Islam di India tidak berkembang sebagai ideologi negara, tetapi lebih sebagai bentuk perjuangan politik kelompok minoritas untuk mempertahankan eksistensi sosial dan keagamaan.

Kashmir menjadi arena utama kontestasi politik Islam antara Pakistan dan India karena wilayah ini merepresentasikan persilangan antara identitas agama, nasionalisme, dan kepentingan geopolitik. Pakistan memandang Kashmir sebagai bagian yang secara historis dan demografis dekat dengan identitas Muslim Pakistan, sementara India melihat Kashmir sebagai simbol integritas teritorial negara sekuler yang tidak didasarkan pada identitas agama. Perbedaan perspektif ini menjadikan Kashmir tidak hanya sebagai konflik wilayah, tetapi juga sebagai ruang pertarungan legitimasi politik dan ideologi nasional kedua negara. Beberapa kelompok Islam di Pakistan bahkan menjadikan isu Kashmir sebagai simbol solidaritas umat Islam global, sedangkan pemerintah India sering meringkai konflik Kashmir dalam perspektif keamanan nasional dan anti-separatisme (Bose, 2021). Oleh sebab itu, konflik Kashmir memperlihatkan bagaimana politik Islam menjadi instrumen penting dalam membangun narasi politik, legitimasi negara, dan identitas nasional.

Dalam perkembangannya, politik Islam dalam konflik Pakistan–India mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika global, perubahan politik domestik, dan perkembangan teknologi komunikasi. Politik Islam yang sebelumnya lebih berorientasi pada mobilisasi tradisional berbasis partai, ulama, dan organisasi keagamaan mulai mengalami pergeseran menuju bentuk respons yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan narasi politik yang semakin transnasional, keterlibatan aktor non-negara, hingga pemanfaatan media digital dalam membangun solidaritas Muslim terhadap isu Kashmir (Rosidi, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami

transformasi dalam merespons konflik Pakistan–India sesuai dengan perubahan konteks sosial-politik yang berkembang. Oleh karena itu, memahami sejarah, identitas, dan kontestasi politik Islam menjadi penting untuk menjelaskan transformasi respons politik Islam pada era digital.

Transformasi Politik Islam dalam Merespons Konflik Pakistan–India

Politik Islam dalam konflik Pakistan–India mengalami transformasi seiring perubahan struktur politik, sosial, dan teknologi di kawasan Asia Selatan. Transformasi tersebut terjadi karena politik Islam tidak lagi bergerak dalam pola tradisional yang hanya mengandalkan legitimasi ulama, partai keagamaan, dan mobilisasi berbasis institusi formal negara. Perubahan geopolitik global, demokratisasi, perkembangan media, dan meningkatnya keterlibatan masyarakat sipil mendorong aktor politik Islam untuk mengembangkan bentuk respons yang lebih fleksibel terhadap konflik Pakistan–India, khususnya terkait isu Kashmir. Studi mengenai politik Islam menunjukkan bahwa gerakan Islam kontemporer cenderung bergerak dari model ideologis-konservatif menuju strategi yang lebih pragmatis dan adaptif terhadap realitas politik modern (Bayat, 2007; Mandaville, 2014). Dengan demikian, transformasi politik Islam dalam konflik Pakistan–India memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari pola politik yang eksklusif menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional.

Di Pakistan, transformasi politik Islam terlihat dari perubahan strategi kelompok Islam dalam merespons konflik Kashmir. Pada fase awal pascakemerdekaan, politik Islam di Pakistan cenderung menempatkan konflik Pakistan–India sebagai perjuangan ideologis umat Islam yang harus dipertahankan melalui solidaritas agama dan mobilisasi politik berbasis sentimen keislaman. Organisasi seperti *Jamaat-e-Islami* dan berbagai kelompok Islam konservatif menggunakan narasi jihad dan kewajiban religius untuk membangun legitimasi politik domestik terhadap kebijakan negara mengenai Kashmir (Nasr, 2001). Namun, dalam perkembangan kontemporer, respons politik Islam di Pakistan mulai mengalami moderasi dengan menggabungkan isu keamanan, diplomasi internasional, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari strategi politik mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik Islam di Pakistan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat ideologis, tetapi juga berkembang menjadi instrumen politik yang lebih pragmatis dalam menghadapi dinamika konflik regional.

Perubahan lain juga tampak pada pergeseran aktor politik Islam dalam merespons konflik Pakistan–India. Jika sebelumnya respons politik lebih didominasi elite ulama dan

partai Islam tradisional, maka era kontemporer memperlihatkan munculnya aktor baru seperti organisasi masyarakat sipil Muslim, akademisi, diaspora Pakistan, aktivis hak asasi manusia, hingga kelompok advokasi digital yang aktif membangun opini global mengenai Kashmir. Pergeseran ini dipengaruhi oleh meningkatnya keterhubungan global dan berkembangnya media komunikasi lintas negara yang memungkinkan isu Kashmir dibawa ke ruang publik internasional. Menurut Mandaville (2014), transformasi politik Islam modern ditandai oleh semakin beragamnya aktor keagamaan yang tidak lagi terbatas pada struktur formal keagamaan, melainkan berkembang melalui jaringan transnasional dan komunitas digital. Oleh sebab itu, transformasi aktor politik Islam memperlihatkan bahwa respons terhadap konflik Pakistan–India kini berlangsung dalam ruang politik yang jauh lebih luas daripada sebelumnya.

Di India, transformasi politik Islam berkembang melalui strategi adaptasi komunitas Muslim terhadap meningkatnya nasionalisme Hindu dan perubahan kebijakan negara. Muslim India yang sebelumnya lebih berorientasi pada politik representasi elektoral mulai mengembangkan bentuk mobilisasi baru berbasis hak sipil, perlindungan identitas minoritas, dan advokasi konstitusional. Hal ini semakin terlihat setelah pencabutan Pasal 370 tahun 2019 yang memicu resistensi dari berbagai organisasi Muslim dan kelompok masyarakat sipil. Respons politik Islam di India tidak lagi hanya dilakukan melalui partai politik seperti *All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen* (AIMIM), tetapi juga melalui gerakan sosial, forum intelektual Muslim, serta kampanye digital yang menyoroti isu diskriminasi dan hak-hak Muslim Kashmir (Jalal, 2000; Schofield, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi politik Islam di India berkembang melalui strategi negosiasi identitas dalam sistem demokrasi yang pluralistik.

Selain perubahan aktor dan strategi politik, transformasi politik Islam juga terlihat dari perubahan narasi dalam merespons konflik Pakistan–India. Narasi politik Islam yang sebelumnya sangat dominan menggunakan bahasa ideologis seperti perjuangan agama, jihad, dan solidaritas umat, mulai bergeser ke arah isu-isu yang lebih universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan perdamaian kawasan. Pergeseran narasi ini terjadi karena aktor politik Islam semakin menyadari pentingnya memperoleh legitimasi global di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap konflik Kashmir. Olivier Roy menjelaskan bahwa transformasi Islam politik kontemporer ditandai oleh kemampuan gerakan Islam menyesuaikan bahasa politiknya dengan nilai-nilai universal tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas religius. Dengan demikian, transformasi narasi politik

Islam memperlihatkan adanya proses adaptasi strategis dalam merespons konflik Pakistan–India di tengah perubahan politik global (Roy, 2004).

Transformasi politik Islam dalam konflik Pakistan–India pada akhirnya memperlihatkan bahwa politik Islam bukan entitas yang statis, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan geopolitik yang berkembang. Politik Islam kini bergerak dari pola mobilisasi tradisional menuju model yang lebih cair, transnasional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Munandar & Susanti, 2025). Pergeseran tersebut menjadi fondasi penting dalam memahami bagaimana politik Islam kemudian berinteraksi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin memengaruhi pembentukan opini publik dan mobilisasi politik terkait konflik Pakistan–India. Oleh karena itu, transformasi politik Islam menjadi pintu masuk utama untuk menjelaskan perubahan respons politik Islam pada era digital.

Era Digital dan Perubahan Respons Politik Islam Terhadap Konflik Pakistan–India

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola respons politik Islam terhadap konflik Pakistan–India. Transformasi ini terjadi karena ruang digital menghadirkan arena politik baru yang memungkinkan penyebaran ideologi, mobilisasi opini publik, dan pembentukan solidaritas lintas batas berlangsung secara cepat dan masif. Sebelum era digital, respons politik Islam terhadap konflik Pakistan–India lebih banyak dilakukan melalui jalur konvensional seperti partai politik, mimbar keagamaan, media cetak, dan forum diplomasi (Munandar dkk., 2025). Namun, perkembangan internet dan media sosial telah memperluas ruang politik Islam ke dalam arena virtual yang memungkinkan keterlibatan aktor negara maupun non-negara secara simultan (Howard & Hussain, 2013). Dengan demikian, era digital tidak hanya mengubah medium komunikasi politik Islam, tetapi juga mengubah karakter respons terhadap konflik Pakistan–India.

Media sosial menjadi instrumen utama dalam membentuk respons politik Islam terhadap isu Kashmir dan konflik Pakistan–India. Platform seperti X (Twitter), Facebook, Instagram, Telegram, dan YouTube digunakan oleh organisasi Islam, aktivis Muslim, ulama, hingga masyarakat sipil untuk menyebarkan narasi solidaritas terhadap Muslim Kashmir, kritik terhadap kebijakan India, maupun dukungan terhadap posisi Pakistan. Dalam banyak kasus, media sosial memungkinkan isu Kashmir memperoleh perhatian internasional melalui kampanye digital, penggunaan *hashtags*, dan produksi konten visual yang memperkuat identitas kolektif Muslim. Penelitian Tyagi menunjukkan bahwa media sosial di India dan Pakistan memainkan peran penting dalam memperkuat polarisasi politik

melalui penyebaran narasi yang emosional dan identitas berbasis agama (Tyagi dkk., 2020). Oleh sebab itu, media digital telah menjadi arena strategis baru bagi politik Islam dalam membangun legitimasi, solidaritas, dan pengaruh politik terkait konflik Pakistan–India.

Era digital juga mendorong lahirnya bentuk baru mobilisasi politik Islam melalui digital activism atau aktivisme digital. Aktivisme ini berkembang karena teknologi memungkinkan individu maupun kelompok untuk mengorganisasi dukungan politik tanpa harus bergantung pada struktur formal organisasi keagamaan atau partai politik. Dalam konteks konflik Pakistan–India, berbagai kampanye daring mengenai Kashmir dilakukan melalui petisi digital, diskusi virtual, siaran langsung keagamaan, hingga forum solidaritas Muslim global yang melibatkan diaspora Pakistan dan komunitas Muslim internasional (Rohid dkk., 2025). Menurut Castells, masyarakat jaringan (*network society*) memungkinkan gerakan sosial berkembang lebih cair, horizontal, dan berbasis komunikasi digital dibandingkan pola mobilisasi tradisional (Castells, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam di era digital mengalami pergeseran dari model hierarkis menuju pola mobilisasi yang lebih fleksibel dan transnasional.

Di sisi lain, perkembangan ruang digital juga memperbesar risiko polarisasi politik dan radikalisasi identitas keagamaan dalam konflik Pakistan–India. Hal ini terjadi karena algoritma media sosial cenderung memperkuat *echo chamber*, yaitu kondisi ketika pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan politik mereka sendiri. Akibatnya, berbagai narasi nasionalisme religius dan propaganda konflik sering kali berkembang secara eksklusif dan memperdalam antagonisme antar kelompok. Penelitian Howard dan Hussain menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki sifat ambivalen karena dapat menjadi sarana demokratisasi sekaligus mempercepat konflik sosial-politik berbasis identitas (Howard & Hussain, 2013). Dalam kasus Pakistan–India, ruang digital tidak hanya menjadi arena solidaritas Muslim, tetapi juga tempat berkembangnya ujaran kebencian, propaganda anti-Muslim, dan narasi permusuhan yang memperburuk ketegangan geopolitik.

Fenomena *misinformation* dan propaganda digital juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan respons politik Islam terhadap konflik Pakistan–India. Penyebaran berita palsu, manipulasi visual, serta informasi yang bias sering digunakan untuk membangun opini publik yang mendukung kepentingan politik tertentu. Dalam berbagai momentum konflik di Kashmir, video lama, gambar manipulatif, maupun narasi provokatif kerap digunakan untuk memobilisasi sentimen keagamaan dan nasionalisme domestik. Studi Haroon menunjukkan bahwa penyebaran *misinformation* di Pakistan meningkat

secara signifikan melalui media sosial, terutama pada isu politik dan keamanan nasional (Haroon dkk., 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital menciptakan tantangan baru bagi politik Islam karena respons terhadap konflik tidak lagi dibangun melalui fakta objektif, melainkan sering kali dipengaruhi oleh pertarungan narasi digital.

Meskipun demikian, era digital juga membuka peluang bagi politik Islam untuk membangun pendekatan yang lebih dialogis terhadap konflik Pakistan–India. Teknologi digital memungkinkan munculnya ruang diskusi lintas negara, forum akademik virtual, diplomasi masyarakat sipil, dan kampanye perdamaian berbasis agama yang sebelumnya sulit dilakukan. Beberapa organisasi Muslim moderat mulai menggunakan platform digital untuk mempromosikan narasi perdamaian, toleransi, dan penyelesaian konflik secara diplomatik dibandingkan pendekatan konfrontatif. Menurut Mandaville, transformasi politik Islam modern ditandai oleh meningkatnya kemampuan aktor Islam dalam mengadaptasi teknologi untuk tujuan sosial-politik yang lebih inklusif (Mandaville, 2014). Oleh karena itu, era digital tidak hanya memperkuat konflik, tetapi juga menghadirkan peluang baru bagi politik Islam untuk berkontribusi dalam pembangunan perdamaian di Asia Selatan.

Perubahan respons politik Islam terhadap konflik Pakistan–India pada era digital menunjukkan bahwa teknologi tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan telah menjadi arena baru kontestasi politik dan identitas keagamaan. Politik Islam kini tidak lagi hanya bergerak melalui ruang fisik dan institusi formal, tetapi juga berkembang dalam ruang virtual yang sangat dinamis, cepat, dan transnasional. Transformasi tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana narasi politik Islam kemudian direkonstruksi dalam konteks konflik Pakistan–India di era digital. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai rekonstruksi narasi politik Islam menjadi penting untuk menjelaskan arah perubahan politik Islam pada fase kontemporer.

Rekonstruksi Narasi Politik Islam dalam Konflik Pakistan–India Di Era Digital

Rekonstruksi narasi politik Islam dalam konflik Pakistan–India terjadi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan politik global dan perkembangan teknologi digital yang mengubah pola komunikasi masyarakat. Politik Islam yang sebelumnya banyak dibangun melalui narasi perjuangan fisik, identitas keagamaan eksklusif, dan mobilisasi berbasis institusi tradisional mulai mengalami perubahan menuju pola komunikasi yang lebih fleksibel, simbolik, dan berbasis media digital. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh

meningkatnya keterhubungan global yang memungkinkan aktor politik Islam menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan kebutuhan audiens modern yang lebih digital dan transnasional. Menurut Roy, transformasi Islam politik kontemporer ditandai oleh proses adaptasi terhadap globalisasi, di mana identitas Islam tidak lagi terbatas pada ruang nasional, melainkan berkembang melalui jaringan komunikasi global (Roy, 2004). Oleh karena itu, rekonstruksi narasi politik Islam menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan relevansi politik Islam dalam konflik Pakistan–India di era digital.

Salah satu bentuk rekonstruksi narasi politik Islam terlihat pada pergeseran bahasa politik yang digunakan dalam merespons isu Kashmir. Jika pada periode sebelumnya konflik Kashmir sering dibingkai melalui narasi religius seperti *jihad*, perjuangan umat Islam, dan konflik peradaban, maka era digital memperlihatkan pergeseran menuju narasi yang lebih universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan kebebasan sipil. Pergeseran ini terjadi karena aktor politik Islam menyadari bahwa legitimasi internasional lebih mudah diperoleh melalui bahasa universal yang diterima komunitas global dibandingkan retorika ideologis yang cenderung eksklusif. Misalnya, berbagai organisasi Muslim dan aktivis Pakistan kini lebih banyak menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir sebagai instrumen diplomasi digital untuk memperoleh simpati global terhadap penderitaan Muslim Kashmir (Bose, 2021). Dengan demikian, politik Islam tidak meninggalkan identitas religiusnya, tetapi melakukan penyesuaian narasi agar lebih kompatibel dengan diskursus internasional.

Rekonstruksi narasi politik Islam juga ditandai oleh pergeseran arena mobilisasi dari ruang fisik menuju ruang digital. Sebelumnya, dukungan terhadap konflik Pakistan–India banyak dilakukan melalui demonstrasi jalanan, khutbah masjid, forum politik, atau organisasi keagamaan formal. Namun, era digital telah mengubah pola tersebut melalui kampanye *hashtag*, petisi daring, video pendek, podcast keagamaan, dan forum solidaritas Muslim global yang dapat menjangkau jutaan audiens secara simultan. Media sosial seperti X (Twitter), Telegram, Instagram, dan YouTube menjadi medium utama dalam membangun opini publik mengenai konflik Kashmir, baik untuk memperkuat solidaritas Muslim maupun membangun tekanan politik terhadap India. Castells menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) menghasilkan pola gerakan sosial yang lebih cair dan berbasis komunikasi horizontal, sehingga memungkinkan aktor politik bergerak lebih cepat dibandingkan struktur organisasi tradisional (Castells, 2015). Oleh sebab itu, rekonstruksi narasi politik Islam di era digital tidak hanya menyangkut perubahan isi pesan, tetapi juga perubahan medium dan strategi mobilisasi politik.

Selain itu, rekonstruksi narasi politik Islam memperlihatkan meningkatnya dimensi transnasional dalam respons terhadap konflik Pakistan–India. Konflik Kashmir tidak lagi dipandang sebagai isu domestik Pakistan–India semata, tetapi berkembang menjadi bagian dari solidaritas global umat Islam. Diaspora Pakistan, organisasi Islam internasional, influencer Muslim, serta aktivis hak asasi manusia turut memainkan peran penting dalam membangun kesadaran global mengenai konflik Kashmir melalui media digital. Menurut Mandaville, politik Islam modern semakin dipengaruhi oleh hubungan lintas negara yang memungkinkan terbentuknya identitas politik berbasis solidaritas global. Hal ini terlihat dari bagaimana isu Kashmir sering menjadi bagian dari kampanye digital Muslim internasional yang menghubungkan konflik lokal dengan narasi ketidakadilan terhadap umat Islam secara global (Mandaville, 2014). Dengan demikian, rekonstruksi politik Islam telah memperluas arena konflik dari level regional menuju ruang politik transnasional.

Meskipun rekonstruksi narasi politik Islam membuka peluang baru dalam membangun solidaritas dan advokasi global, perubahan ini juga menghadirkan paradoks dalam praktik politik digital. Pada satu sisi, media digital dapat memperkuat kesadaran politik, membangun jaringan solidaritas, dan memperluas akses informasi mengenai konflik Kashmir. Namun, pada sisi lain, ruang digital juga rentan menjadi arena manipulasi informasi, propaganda, dan penyebaran sentimen kebencian berbasis identitas agama. Algoritma media sosial sering kali memperkuat polarisasi dengan menghadirkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga mempersempit ruang dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi politik Islam di era digital menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara solidaritas keagamaan dan risiko eskalasi konflik berbasis narasi digital.

Pada akhirnya, rekonstruksi narasi politik Islam dalam konflik Pakistan–India memperlihatkan bahwa politik Islam merupakan entitas dinamis yang terus menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Politik Islam tidak lagi hanya bergantung pada simbolisme tradisional dan mobilisasi berbasis agama semata, tetapi mulai mengintegrasikan nilai universal, strategi komunikasi digital, dan jaringan transnasional dalam merespons konflik geopolitik modern. Transformasi ini menunjukkan bahwa konflik Pakistan–India di era digital tidak hanya berlangsung dalam bentuk persaingan militer atau diplomatik, tetapi juga melalui kontestasi narasi di ruang digital yang membentuk persepsi publik global. Oleh karena itu, memahami rekonstruksi narasi politik Islam menjadi penting untuk membaca arah perkembangan konflik Pakistan–India pada masa mendatang sekaligus memahami bagaimana agama bertransformasi dalam lanskap politik digital kontemporer.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi politik Islam dalam merespons konflik Pakistan–India di era digital menunjukkan bahwa konflik kedua negara tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh persoalan geopolitik dan sengketa wilayah Kashmir, tetapi juga oleh dinamika identitas keagamaan dan perkembangan teknologi komunikasi. Politik Islam di Pakistan berkembang sebagai bagian dari identitas negara yang memperkuat solidaritas terhadap Muslim Kashmir, sedangkan di India lebih diarahkan pada perjuangan mempertahankan hak-hak minoritas Muslim di tengah menguatnya nasionalisme Hindu. Dengan demikian, politik Islam menjadi elemen penting dalam membentuk respons sosial dan politik terhadap konflik Pakistan–India.

Penelitian ini menemukan bahwa politik Islam mengalami transformasi dari pola mobilisasi tradisional berbasis ulama, partai politik, dan organisasi keagamaan menuju bentuk yang lebih fleksibel, pragmatis, dan transnasional. Era digital mempercepat perubahan tersebut melalui pemanfaatan media sosial sebagai arena baru pembentukan opini publik, solidaritas Muslim global, dan mobilisasi politik terkait isu Kashmir. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan risiko berupa polarisasi identitas, penyebaran misinformation, serta propaganda digital yang berpotensi memperburuk eskalasi konflik di ruang virtual.

Selain itu, rekonstruksi narasi politik Islam di era digital memperlihatkan adanya pergeseran dari narasi ideologis yang eksklusif menuju penggunaan bahasa politik yang lebih universal seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Politik Islam tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen mobilisasi berbasis agama, tetapi juga berkembang menjadi medium advokasi global yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh legitimasi internasional terhadap isu Kashmir. Oleh karena itu, politik Islam di era digital memiliki posisi ambivalen, yakni dapat menjadi faktor eskalasi konflik sekaligus membuka peluang bagi pembangunan dialog dan perdamaian yang lebih konstruktif di kawasan Asia Selatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penguatan pendekatan dialogis dan diplomasi digital dalam merespons konflik Pakistan–India, khususnya yang melibatkan aktor-aktor politik Islam, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas Muslim lintas negara. Pemanfaatan media digital seharusnya tidak hanya diarahkan pada mobilisasi politik berbasis identitas dan solidaritas emosional, tetapi juga digunakan sebagai sarana

membangun komunikasi lintas kelompok, penyebaran narasi perdamaian, serta penguatan literasi digital guna mengurangi penyebaran *misinformation*, propaganda, dan ujaran kebencian yang berpotensi memperburuk eskalasi konflik.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai transformasi politik Islam di era digital dengan menggunakan pendekatan empiris, seperti analisis media sosial, wawancara dengan aktor politik Islam, atau studi komparatif pada konflik geopolitik di kawasan Muslim lainnya. Hal ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana politik Islam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam membangun stabilitas politik dan perdamaian di tengah konflik kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Bayat, A. (2007). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press.
- Bose, S. (2021). *Kashmir at the Crossroads: Inside a 21st-Century Conflict*. Yale University Press.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (2 ed.). Polity Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5 ed.). SAGE Publications.
- Ganguly, S. (2002). *Conflict Unending: India-Pakistan Tensions Since 1947*. Columbia University Press.
- Haroon, D., Arif, H., Tariq, A. A., Nawaz, F., Qazi, I. A., & Mustafa, M. (2021). Investigating Misinformation Dissemination on Social Media in Pakistan. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2106.09338>
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Majid, D. A., Ali, S., Awan, F. A., & Kousar, S. (2020). Kashmir: The Major Source of Conflict between Pakistan and India. *South Asian Studies*, 34(2). <http://111.68.103.26/journals/index.php/IJSAS/article/view/3263>
- Mandaville, P. (2014). *Islam and Politics* (2 ed.). Routledge.
- Munandar, A., Muttaqin, F. F., & Susanti, E. (2025). Media Sosial antara Hegemoni dan Emansipasi: Tinjauan Kritis terhadap Peran Edukatif dalam Demokrasi Digital Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi sa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6979649421517068954&hl=en&oi=scholar>

- Munandar, A., & Susanti, E. (2025). Politik Identitas Dalam Masyarakat Multikultural:(Studi Kasus Politik Sosial di Indonesia). *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1–14.
- Munhanif, A., & Yasin, Y. (2023). Religion and The Politics of Nationalist Thought: Comparative Analysis of Hindu Nationalism in India and Muslim Nationalism in Indonesia. *Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 151–172. <https://doi.org/10.15408/iu.v9i1.32065>
- Nasr, S. V. R. (2001). *Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power*. Oxford University Press.
- Rohid, N., Sugihartati, R., Suyanto, B., Susilo, D., & Zikri, A. (2025). Digital Activism in Contemporary Islamic Politics: A Critical Analysis of Social Media’s Impact on Islamic Movements. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 208–233. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10159>
- Rosidi, I. (2021). Da’wah and politics among Muslim preachers in contemporary Indonesia. *Intellectual Discourse*, 29(1), 35–52.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
- Schofield, V. (2021). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. I.B. Tauris.
- Tyagi, A., Field, A., Lathwal, P., Tsvetkov, Y., & Carley, K. M. (2020). A Computational Analysis of Polarization on Indian and Pakistani Social Media. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2005.09803>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zubair, M., Raza, A., & Islam, S. (2022). The coexistence of religion and politics in Pakistan: An analysis of historical, social, and political factors. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS-Asia)*, 3(1), 435–446. (Pakistan). <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/3.1.30>